

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa karena memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan pengembangan UKM di Provinsi Maluku Utara sebagai kegiatan usaha untuk peningkatan nilai tambah produk primer yang di hasilkan, menganalisis daya dukung sumber daya dalam pengembangan UMKM di provinsi Maluku Utara, dan menganalisis strategi pengembangan UMKM dengan mempertimbangkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, tenaga pekerja yang berada di wilayah tersebut. Ini menandakan bahwa UMKM dapat mempertinggi taraf hidup dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar ( Ningtyas, 2018).

Lamazi (2020), Sesuai dengan perkembangan UMKM dalam melaporkan laporan keuangannya, kini telah dikeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). Penerapan standar akuntansi ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja manajemen UMKM di masa lalu dan prospek di masa depan, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh pen gurus maupun oleh anggota UMKM dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan lain yang berhubungan dengan UMKM. Sejak diberlakukannya SAK EMKM persepsi dari berbagai pihak muncul sebagai tanggapan atas tingkat efektifitas, efisiensi, tingkat kemudahan maupun kegunaan adanya standar yang baru. Entitas yang dapat menggunakan standar ini yakni entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dengan adanya SAK EMKM ini kedepannya tentu sangat diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporankeuangan yang lebih informatif dengan tujuan untuk memberikan

kemudahan bagi investor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM (Rahadiansyah, 2018).

Keifer & Effenberger (1967), Walaupun cukup ringkas, tidak banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini. Kehadiran standar ini dapat menjadi acuan yang lebih mudah bagi kalangan yang lebih luas untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diterima secara umum. Kenyataannya tingkat kebutuhan SAK EMKM bagi UMKM masih sangat rendah dan SAK EMKM juga masih dianggap memberatkan bagi Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi keberlangsungan usahanya.

Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan di dalam suatu usaha terkesan apa adanya. Yuliati et al (2019), Hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan pengelola usaha kecil menjadi tidak terarah dan akan menyulitkan manajer dalam mengontrol tentang informasi akuntansinya. Inilah yang menjadi permasalahan UMKM pada saat ini, khususnya di bidang keuangan. Permasalahan tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan UMKM (Niode, 2009).

(YANUAR, Muhammad Rizki. PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU UMKM TERHADAP DIGITALISASI DALAM BIDANG PEMASARAN (studi kasus: usaha mikro kecil dan menengah di kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2018 (2020), Di dunia bisnis, para pelaku bisnis usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, sebagai contoh tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di

sisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiaya i.

Menurut Kesamben & Jombang (2021) karena dengan akses tersebut UMKM dapat mengembangkan usaha dan mendapat suntikan dana dari lembaga keuangan. Salah satunya adalah dengan menyajikan laporan keuangan sebagai acuan bagi lembaga keuangan untuk menilai layak atau tidaknya UMKM tersebut. Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Menurut Andi & Hurriati (2021), dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah SAK EMKM diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berlaku efektif per 1 Januari 2018. Bertujuan agar perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri juga dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan yang mereka kelola dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya (Siagian dan NIndra 2019).

Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang dilakukan oleh IAI untuk usaha kecil dan menengah, keberadaannya belum banyak diketahui oleh pemilik usaha kecil dan menengah serta kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama kurang dikenalnya SAK EMKM di lingkungan UMKM Fatwitawati (2018).

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan peneliti tertarik untuk meneliti kembali analisis penerapan SAK EMKM pada usaha mikro kecil dan menengah di kota ternate

(studi kasus di umkm intima home industry pakesang ternate). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Handayani (2018), yang meneliti tentang Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Ternate (Studi Kasus Di Umkm Intima Home Industry Pakesang Ternate). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah melihat apakah UMKM Intima Home Industry sudah menerapkan standar akuntansi keuangan atau belum. Sehingga judul penelitian ini adalah ‘ **ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM INTIMA HOME INDUSTRY (PAKESANG) TERNATE**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terkait dengan tema penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Ternate?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan UMKM Intima Home Industry Pakesang Ternate.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dengan melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat praktis Bagi UMKM Intima Home Industry Pakesang Ternate, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menerapkan SAK EMKM.
2. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya terkait penerapan SAK EMKM